

**PROBLEMATIKA PARTISIPASI DALAM SIKLUS DANA DESA : STUDI
KASUS KARANG TARUNA DESA BENDUNGAN KECAMATAN WATES
KABUPATEN KULON PROGO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana

Strata Satu Bidang Sosiologi

Disusun oleh:

MUH IOBAL PRAMUDYA

20107020032

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Iqbal Pramudya
NIM : 20107020032
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Sosiologi
Alamat Rumah : Sanggrahan Kidul, Bendungan, Wates, Kulon Progo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi yang saya ajukan ini benar dan asli hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri bukan plagiasi dari karya atau penelitian orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 08 November

2024

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Muh Iqbal Pramudya

20107020032

SURAT DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh Iqbal Pramudya

NIM : 20107020032

Prodi : Sosiologi

Judul : Problematika Partisipasi dalam Siklus Penganggaran Dana

Desa : Studi Kasus Karang Taruna Desa Bendungan

Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo


Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sosiologi. Dengan ini saya mengharapkan saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 November 2024

Pembimbing,


Achmad Uzair, S.I.P., M.A., Ph.D.
NIP : 19780315 201101 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-6342/Un.02/DSH/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : Problematikan Partisipasi dalam Siklus Dana Desa : Studi Kasus Karang Taruna Desa Bendungan Kecamatan Wates kabupaten Kulon Progo

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH IQBAL PRAMUDYA
Nomor Induk Mahasiswa : 20107020032
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Desember 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6769ff6f01307

Ketua Sidang

Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 6768f9cb10384

Penguji I

Nisrina Muthahari, M.A.
SIGNED



Valid ID: 676a164e795f9

Penguji II

Dwi Nur Laela Fithriya, S.IP., M.A.
SIGNED



Valid ID: 676a91df3c255

Yogyakarta, 03 Desember 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si.
SIGNED

MOTTO

“Setiap hal yang terjadi selalu menyimpan makna, sebuah kehilangan pasti akan diganti dengan yang lebih baik menurutNya. Jadi jalani dan nikmati setiap proses yang sudah terjadi sedang terjadi atau akan terjadi”.

- **Muh Iqbal Pramudya** -

“Let’s Try, Teruslah mencoba karena lebih baik mencoba dari pada tidak sama sekali. Ketika saya berani mencoba maka saya akan tahu saya gagal atau berhasil, tetapi Ketika saya memutuskan tidak mencoba maka dipastikan saya adalah orang yang gagal.”

- **Merry Riana** -

"Jika kamu ingin menjadi lebih baik, lakukan hal-hal yang tidak ingin dilakukan orang lain. Lakukan hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang lain untuk dilakukan."

- **David Goggins** -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dalam penyusunannya, dengan segala proses dan perjuangan saya persembahkan setulus hati untuk ayah dan ibu saya tercinta, Bapak Fathoni dan Ibu Hesty Wahyuni atas segala doa, dukungan, nasihat, kesabaran dalam mendidik yang diberikan kepada saya. Kepada adik-adik saya tercinta Pandu dan Keisya yang telah menjadi warna dalam hidup saya saat ini dan semoga dengan skripsi ini dan gelar yang didapat bisa menjadi pembuka gerbang kehidupan yang lebih baik bagi kalian.

Kepada kakek, nenek, dan seluruh keluarga saya yang telah turut serta merawat saya dari kecil hingga saat ini, semoga apa yang telah kalian berikan kepada saya akan menjadi titik awal kesuksesan saya, agar bisa membalas segala kebaikan yang belum tentu bisa terbalas.

Kepada kawan-kawan Sosiologi angkatan 2020 UIN Sunan Kalijaga yang selalu menjadi penyemangat dan kawan yang baik selama saya menjalankan studi.

Tak lupa skripsi ini saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya, Bapak Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D. yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada saya dan membantu dalam proses menempuh gelar strata-1. Juga saya persembahkan kepada kawan-kawan Karang Taruna Desa Bendungan dan Karang Taruna Permusaki yang telah menjadi inspirasi dalam menyusun penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Partisipasi dalam Siklus Penganggaran : Studi Kasus Karang Taruna Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengakui bahwa penulisan ini dari awal hingga akhir tidak lepas dari andil berbagai pihak yang senantiasa mendukung penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Ibu Dr. Erika Setyanti Kusumaputri, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
3. Ibu Dr. Napsiah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu UI Ardaninggar Luhtitianti, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu aktif memberikan informasi tentang Prodi Sosiologi
5. Bapak Achmad Uzair, S.IP., M.A., Ph.D. selaku dsen pembimbing skripsi yang telah membimbing peneliti dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir.
6. Kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Fathoni dan Ibu Hesty Wahyuni yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun material.
7. Kepada Kakek dan Nenek serta keluarga besar penulis yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing penulis hingga saat ini.
8. Kepada seluruh dosen Prodi Sosiologi yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalankan pendidikan.
9. Kepada seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian ini kepada penulis.
10. Kepada kawan-kawan Prodi Sosiologi angkatan 2020 yang telah kebersamaan penulis selama menjalankan pendidikan di kampus ini.
11. Kepada semua pihak baik keluarga maupun teman yang tidak bisa ditulis satu persatu

dalam pengantar ini, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

12. Kepada seseorang yang namanya ada di *Lauhul Mahfuz*, yang menjadi alasan peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dan segera memantaskan diri agar kelak bertemu dalam versi terbaik dari penulis.
13. Kepada seseorang yang pernah ada dan tidak bisa disebut namanya, terimakasih untuk apa yang pernah diberikan yang telah menjadi motivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
14. Terakhir kepada diri saya sendiri yang telah bertahan hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi pribadi yang luar biasa dan tidak menyerah sesulit apapun proses dalam menyusun skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan atas kritik dan sarannya diucapkan terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua.

Yogyakarta, 14 November 2024

Penyusun



Muh Iqbal Pramudya

NIM : 2010702003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Landasan Teori	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Metode Analisis data	21
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB V.....	24
PENUTUP.....	24
A. Kesimpulan.....	24
B. Saran	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN	31
CURRICULUME VITAE.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Kepala Desa Bendungan	36
Gambar 2 Wawancara dengan Kesra Bendungan	36
Gambar 3 Wawancara dengan Karang Taruna.....	37
Gambar 4 Musyawarah Dana Desa	37
Gambar 5 Musyawarah Dana Desa	38
Gambar 6 Karang Taruna di Desa Bendungan.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan wawancara informan perangkat desa	32
Lampiran 2 : Pertanyaan wawancara informan Karang Taruna	34
Lampiran 3 : Lembar bimbingan skripsi	35



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika partisipasi Karang Taruna Desa Bendungan dalam siklus penganggaran dana desa. Karang Taruna Desa Bendungan, sebagai organisasi pemuda yang berperan strategis di masyarakat, memiliki potensi besar dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan dana desa. Penelitian ini secara khusus berfokus pada keterlibatan mereka dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa, serta mengungkap kendala yang dihadapi dalam memastikan kebijakan desa mencerminkan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda.

Berdasarkan analisis dengan teori partisipasi Andrea Cornwall, ditemukan bahwa partisipasi Karang Taruna Desa Bendungan masih berada pada tingkat fungsional. Keterlibatan mereka terlihat dominan pada tahap pelaksanaan dan pengawasan program-program desa, sementara peran mereka dalam pengambilan keputusan strategis masih terbatas. Keberhasilan partisipasi mereka tercermin melalui program pelatihan keterampilan pemuda yang diinisiasi oleh Karang Taruna, meskipun mereka menghadapi kendala berupa keterbatasan aksesibilitas terhadap dana desa, minimnya dukungan finansial dari pemerintah desa, serta adanya pengaruh kepentingan dari kelompok masyarakat lain.

Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas Karang Taruna Desa Bendungan melalui pelatihan dan penguatan peran strategis, peningkatan sinergi antara Karang Taruna dan pemerintah desa, serta pengembangan model partisipasi yang lebih inklusif. Dengan langkah-langkah ini, Karang Taruna Desa Bendungan diharapkan dapat menjadi aktor kunci yang lebih efektif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan melalui pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Karang Taruna Desa Bendungan, Partisipasi, Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Problematika.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the challenges of Karang Taruna Desa Bendungan's participation in the village fund budgeting cycle. Karang Taruna Desa Bendungan, as a youth organization with a strategic role in the community, holds significant potential to support transparency, accountability, and sustainable development through the management of village funds. This research focuses on their involvement in the stages of planning, implementation, and monitoring of village funds, as well as the obstacles they face in ensuring that village policies reflect community needs, particularly those of the younger generation.

Using Andrea Cornwall's theory of participation, the study found that Karang Taruna Desa Bendungan's participation generally falls under the functional level. Their involvement is primarily evident during the implementation and monitoring of village programs, while their role in strategic decision-making remains limited. The success of their participation is highlighted by initiatives such as youth skill training programs spearheaded by Karang Taruna, despite facing challenges such as limited access to village funds, insufficient financial support from the village government, and competing interests from other community groups.

This study recommends enhancing the capacity of Karang Taruna Desa Bendungan through training and strengthening their strategic role, fostering greater synergy between Karang Taruna and the village government, and developing more inclusive participation models. These measures are expected to enable Karang Taruna Desa Bendungan to become a more effective key actor in promoting transparency and accountability while advancing sustainable village development through the management of village funds.

Keywords: Karang Taruna Desa Bendungan, Participation, Village Fund Management, Transparency, Accountability, Challenges.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keterlibatan pemuda dalam setiap program perencanaan dan pembangunan di suatu daerah merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam birokrasi pemerintah daerah. Karena pemuda merupakan generasi penerus yang nantinya akan menggantikan jabatan-jabatan yang ada di suatu daerah. Mengacu pada hal itu dalam penelitian ini akan berfokus pada keterlibatan pemuda dalam bentuk partisipasi dalam penganggaran dana desa. Dalam suatu pemerintahan daerah terdiri dari beberapa sub bagian, sub bagian terkecil yaitu desa. Desa dapat didefinisikan sebagai suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup Bersama, mereka dapat menggunakan lingkungan desa untuk mempertahankan, melangsungkan hidup, dan mengembangkan kehidupan.¹ Dalam pelaksanaannya agar aturan dan tatacara dalam melaksanakan implementasi pengertian desa dapat berjalan, suatu desa membutuhkan pemerintahan atau birokrasi desa. Birokrasi desa jika dimaknai dengan pengertian birokrasi menurut max weber merupakan sebuah sistem pengelolaan dalam organisasi pemerintahan yang berpijak pada teori dan norma yang relevan serta memiliki spesialisasi sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang ditandai oleh adanya keteraturan, ketertiban, pembagian wewenang dan jalur hirarki yang jelas di suatu pemerintahan desa.² Sesuai dengan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa suatu desa yang jalannya pemerintahan diatur oleh birokrasi desa memiliki suatu tujuan bersama sesuai dengan relevansi norma sesuai dengan tujuan suatu desa.

Dalam berjalannya pemerintahan desa untuk mewujudkan norma dan tujuannya terdapat didalamnya program yang telah disusun pemerintahan desa, sebuah desa memiliki program pembangunan dan program keswadayaan yang di sokong oleh pemerintahan pusat dalam bentuk dana desa.³ Dana desa menurut peraturan pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

¹ I Wayan Runa, "Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan," *Awal Mula Pembentukan Desa*, 2013, 1–24.

² Putri Aleeah Antasah, "Menganalisis Program Kalimasada Kota Surabaya Dari Perspektif Prinsip Dasar Birokrasi Weberian," *Jurnal Pengabdian Nasional* 02, no. 06 (2022): 88–97.

³ I Putu Julianto and Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2019): 24–42, <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>.

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁴ Sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah disusun dapat dimaknai bahwa segala sesuatu yang menyangkut tentang pendapatan dan penyelenggaraan pelaksanaan Pembangunan desa sangat diperhatikan oleh pemerintah dengan menganggarkan segala kebutuhan dari suatu desa melalui peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan.

Dalam pengalokasiannya, dana desa memiliki 2 mekanisme dasar. Hal itu tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa, mekanisme dasar pengalokasian dana desa⁵ meliputi :

1. Alokasi Dasar

Alokasi Dasar merupakan pembagian minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Berdasarkan definisi tentang alokasi dasar dapat dilihat bahwa bagaimana pembagian dana desa dilihat dari jumlah presentase minimum secara merata, kemudian nantinya akan dikaji lebih lanjut oleh pemerintah tentang bagaimana pembagiannya setelah melihat presentase minimum kemudian disesuaikan dengan kebutuhan desa.⁶

Alokasi yang dihitung berdasarkan perhatian dari jumlah penduduk, presentase angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.

2. Alokasi Formula

Alokasi Formula menjelaskan bahwa bagaimana dana desa diturunkan pada suatu desa pertama dipertimbangkan dengan berapa jumlah penduduk di desa tersebut, artinya semakin banyak masyarakat yang tinggal di suatu desa maka anggaran yang dilimpahkan di suatu desa akan semakin besar. Setelah melihat jumlah penduduk, kemudian pemerintah akan mempertimbangkan melalui bagaimana presentase angka kemiskinan di suatu desa, semakin banyak masyarakat yang tergolong dibawah garis kemiskinan maka kucuran dana pada suatu desa akan semakin banyak. Luas wilayah dan kesulitan geografis desa

⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN," *Pemerintah RI*, no. 2 (2016): 1–12.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, "Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara," no. 2 (2014): 1–25.

⁶ Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa," *Kemenkeu RI*, 2020.

juga tak luput untuk mempertimbangkan presentase alokasi dana desa, semakin luas wilayah maka infrastruktu yang harus dibangun juga akan semakin besar, apalagi jika luas wilayah ditambah dengan sulitnya akses menuju desa karena letak geografis yang tidak mendukung, maka hal itu akan menambah biaya pendanaan pada suatu desa. Dalam peraturan kementerian keuangan pertimbangan ini juga dikaitkan dengan presentase kerja penduduk dan alokasi kinerja desa.⁷

Kedua mekanisme pengalokasian dana desa saling memiliki keterikatan, jadi bagaimana memberikan dana desa pada suatu wilayah desa memiliki beberapa pertimbangan, dari bagaimana menentukan skala minimum nasional sampai pertimbangan kondisi di suatu desa. Pertimbangan mekanisme pengalokasian dana desa juga harus melalui beberapa tahapan, tidak langsung dilaksanakan oleh pemerintah desa, harus melalui berbagai tahap.

Pengalokasian dana desa melalui beberapa tahap yang harus dilakukan, karena pada dasarnya bagaimana program desa yang diakomodir oleh pemerintah nasional harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan akan pembangunan maupun kebutuhan keswadayaan. Musyawarah sebagai penentu arah kebijakan pengalokasian dana desa dilakukan sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat desa, dalam pelaksanaannya musyawarah pengalokasian dana desa akan melalui proses penampungan aspirasi masyarakat.

Proses penampungan aspirasi masyarakat dilakukan dalam forum musyawarah desa (MUSDES) dalam musyawarah desa seluruh komponen masyarakat turut hadir dalam keputusan kebutuhan Pembangunan di wilayah desa, hal ini nantinya akan menjadi acuan kebutuhan prioritas apa yang akan dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Dalam pelaksanaan musyawarah desa didalamnya terdapat komponen masyarakat yang terdiri dari pemerintah desa itu sendiri, perwakilan masing-masing dusun yang diwakili oleh kepala dusun atau RW, serta kelompok pemuda yang diwakili oleh pengurus karang taruna desa, mereka akan bersama-sama mendiskusikan kebutuhan masing-masing dusun yang akan diputuskan dalam forum musyawarah kalurahan, nantinya akan diputuskan skala prioritas apa yang akan dilaksanakan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan desa yang selanjutnya akan memperlihatkan seberapa besarskala kebutuhan pengalokasian dana desa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah desa.⁸

Dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa hal yang perlu disorot adalah bagaimana

⁷ Peraturan Kementerian Keuangan.

⁸ Septian Aji Permana, "Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015," *Proceeding Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* 1–11 (2015): 318–22

peran dari Karang Taruna. Karang Taruna merupakan organisasi kepemudaan yang berfokus pada penumbuh kembangan usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomi produktif dan rekreasi, olahraga dan kesenian. Karang taruna berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan Lembaga kemasyarakatan merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kalurahan atau komunitas sederajat terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dikembangkan oleh departemen sosial.⁹ Peran dari karang taruna yang perlu dilihat pada pengalokasian dana desa adalah bagaimana peran mereka dalam monitoring alokasi dana desa dan memengaruhi efektifitas pengalokasian dana desa, peran dalam musyawarah maupun peran dalam gerakan sosial masyarakat dalam bentuk aspirasi pembangunan desa. Peran karang taruna sangat dibutuhkan dalam pengalokasian dana desa serta pembangunan dan keswadayaan masyarakat desa, mengingat kita lihat sendiri saat ini bagaimana banyak sekali oknum pejabat desa yang menggunakan wewenang jabatannya untuk menyalahgunakan anggaran desa, fenomena masih ditemukannya pejabat desa yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pengalokasian desa inilah yang menjadi fokus penelitian ini bahwasanya peran karang taruna sangatlah penting dalam monitoring dana desa dan pembangunannya. Nalar kritis dan kepekaan sosial dari pemuda karang taruna sangat dibutuhkan dalam memonitoring alokasi dana desa, kegiatan program kerja dari karang taruna juga tak luput dari bagaimana proses gerakan sosial yang mereka lakukan untuk monitoring dan memengaruhi bagaimana kebijakan dana desa diturunkan.¹⁰

Di Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, gerakan kepemudaan dilakukan oleh pemuda Desa Bendungan yang terafiliasi dalam kelompok Karang Taruna. Saat ini Desa Bendungan yang letak geografisnya berada di Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki wadah karang taruna yang memiliki nama yaitu “Karang Taruna Rela Bhakti” memiliki kepengurusan baru periode 2021-2026 yang dilantik langsung pada 03 Oktober 2021 oleh kepala Desa bapak Mujiyo, S.E. dalam sambutannya beliau mengungkapkan harapannya bagi karang taruna Desa Bendungan agar memanfaatkan organisasi ini sebagai wadah berorganisasi dan sarana untuk lebih bermanfaat

⁹ Jurnal Moderat, “Pelaksanaan Program Karang Taruna dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran” 4, no. November (2018): 71.

¹⁰ Irsan Armadi, “Analisis Peran Pemuda Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1 (2020): 146

bagi masyarakat sekitar.¹¹

Melihat bagaimana besarnya peranan karang taruna dalam pembangunan desa menjadikan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai bagaimana karang taruna menghadapi problematika dinamika penganggaran dana desa sesuai dengan konsep siklus dana desa dan juga melihat bagaimana bentuk partisipasi karang taruna dalam monitoring alokasi dana desa di Desa Bendungan Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini dilakukan dilatar belakang karena beberapa faktor yaitu kekhawatiran penyalahgunaan wewenang pejabat desa dalam mengalokasikan dana desa dan bagaimana pengaruh keterlibatan karang taruna dalam pengalokasian dana desa. selain nalar kritis dan kepekaan sosial yang tajam dari pemuda, adanya gerakan kepemudaan melalui karang taruna juga secara langsung maupun tidak langsung akan turut memajukan kualitas pembangunan dan swadaya masyarakat dari suatu desa. Karena bagaimana majunya suatu desa tergantung dari bagaimana peran partisipasi pemuda dalam mengembangkan suatu desa.

Selain melihat bagaimana peran karang taruna dalam pembangunan di Desa Bendungan, penelitian ini juga di dasari oleh Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 poin 2 menyampaikan bahwa Informasi Publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lembaga yang memiliki kewajiban menyampaikan informasi publik adalah badan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara atau Daerah.¹²

Informasi publik yang sudah dimiliki oleh masing-masing lembaga tersebut yang sifatnya harus disampaikan oleh publik tercantum dalam Undang-Undang tersebut pada BAB 11 dalam bagian Asas dan Tujuan bagian kesatu Pasal 2 menyampaikan bahwa, Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa suatu hal yang sifatnya data publik itu bersifat informasi publik yang wajib untuk diketahui masyarakat secara luas. Dana desa termasuk dalam data publik yang keluar masuknya harus disampaikan ke masyarakat baik melalui platform online

¹¹ Website kalurahan bendungan, “Penguahan Karang Taruna Kalurahan Bendungan Periode 2021-2026”. November (2021).

¹² undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

berupa web maupun platform online berupa baliho dan lain sebagainya.¹³

Namun apakah saat ini alokasi dana desa sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karang taruna, apakah alokasi dana desa sudah turut berperan dalam perkembangan karang taruna. Pengawasan dan partisipasi karang taruna dalam monitoring dana desa juga tak terlepas dari bagaimana perhatian pemerintah kepada karang taruna, pengembangan karang taruna dimasukkan dalam alokasi dana desa bagian dana kepemudaan. Di desa bendungan banyak sekali karang taruna padukuhan di bawah naungan karang taruna desa yang tidak aktif dalam keturutsertaannya membangun desa, ini menjadi sebuah ironi mengingat bagaimana efektivitas sumber daya manusia tergantung bagaimana berkembangnya pemuda disuatu daerah khususnya desa, hal ini terjadi karena kucuran dana yang tidak ada, alokasi dana kepemudaan diberikan langsung kepada karang taruna desa dan minimnya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada sumber daya pemuda yang ada, hal ini menjadikan kewajiban pada karang taruna desa untuk memonitoring bagaimana pengalokasian dana desa sehingga rencana kegiatan untuk pengembangan sumber daya pemuda dapat selalu terlaksana dan terwadahi melalui dana dan kebijakan pemerintah desa. Jika dilihat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan/Desa (APBKalurahan) Bendungan Tahun 2022 tertulis bahwa anggaran keswadayaan dengan jumlah Rp.261.173.000 (Penggabungan dari dana bidang pemberdayaan masyarakat sejumlah Rp168.459.000 dan dana bidang pembinaan kemasyarakatan dengan jumlah Rp.92.174.000) sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah alokasi dana desa pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa dengan jumlah Rp.1.680.336.908 ditambah lagi dengan adanya alokasi dana darurat penanggulangan bencana dan mendesak desa dengan jumlah Rp.441.595.103 dana yang digunakan untuk penanggulangan bencana covid-19.¹⁴

Dengan adanya alokasi dana yang sangat banyak pada pembangunan, menunjukkan bahwa pemerintahan Desa Bendungan kurang memerhatikan program pemberdayaan masyarakat dan adanya Karang Taruna sebagai prioritas Alokasi dana desa. Kurangnya alokasi dana desa pada pemberdayaan masyarakat tentu menjadi sebuah hal yang harusnya memunculkan sikap kritis pemuda dalam melakukan suatu gerakan sosial partisipasi monitoring dana desa. Monitoring dana desa tidak harus terjun langsung ke forum musyawarah kalurahan tapi bisa dengan memasifkan gerakan seluruh elemen karang taruna desa untuk membentuk suatu program kerja yang bisa memengaruhi pemerintah desa agar lebihkan alokasi dana pada dana bidang

¹³ Ibid.

¹⁴ Anggaran pendapatan dan belanja desa, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendungan Tahun 2021", (2021).

swadaya dan dana kepemudaan, akselerasi membangun desa juga bisa menjadi langkah karang taruna agar diperhatikan oleh pemerintah desa dan dapat memengaruhi pengalokasian dana desa. Sehingga gerakan karang taruna desa dalam monitoring transparansi dana desa sangat perlu untuk dilakukan demi berkembangnya sumber daya pemuda dan majunya pembangunan desa.

B. Rumusan Penelitian

Kurangnya perhatian pemerintah desa pada program keswadayaan masyarakat dan akuntabilitas pada pengalokasian dana desa sektor dana kepemudaan menjadikan serta karang taruna harus lebih kritis dalam memperhatikan persoalan itu, partisipasi karang taruna dalam monitoring dana desa harus didukung baik peran dalam musyawarah maupun gerakan sosial. Nantinya bagaimana efektivitas gerakan sosial karang taruna dalam partisipasi monitoring dana desa akan menghasilkan *output* sinergisitas kolaborasi yang sangat kuat antara pemerintahan desa dan karang taruna sebagai langkah mewujudkan kualitas sumber daya manusia serta pembangunan semakin baik dan terstruktur.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat disampaikan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk gerakan sosial dalam rangka partisipasi karang taruna di Desa Bendungan dalam peningkatan kualitas pengalokasian dana desa di Desa Bendungan ?
2. Bagaimana gerakan sosial karang taruna dapat memengaruhi prioritas alokasi dana desa di Desa Bendungan?
3. Bagaimana karang taruna dapat menjadi mitra efektif dalam pelaksanaan program dan proyek yang didanai oleh dana desa di Desa Bendungan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana bentuk gerakan sosial yang dilakukan karang taruna dalam rangka mewujudkan tingkat kualitas pengalokasian dana desa di Desa Bendungan
2. Mengetahui sejauh mana gerakan sosial karang taruna dapat memengaruhi skala prioritas pengalokasian dana desa di Desa Bendungan
3. Mengetahui proses gerakan sosial dalam mewujudkan karang taruna sebagai mitra efektif dalam pelaksanaan program dan proyek pengalokasian dana desa di Desa Bendungan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih atau kontribusi dan

rujukan untuk peneliti lain terkait dengan isu yang sama.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan Sosiologi pada khususnya Sosiologi Politik, dan mata kuliah Sosiologi Pemuda (*Youth Sociology*).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah ketika menghadapi peristiwa serupa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pembaca terkait konflik dan rekonsiliasi konflik yang terjadi di masyarakat tentang bagaimana gerakan sosial karang taruna dapat memengaruhi kebijakan pengalokasian dana desa.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadikan karang taruna desa lebih kritis dalam monitoring anggaran dana desa dan pembangunan desa.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memengaruhi pemerintah desa untuk lebih memperhatikan karang taruna mengingat peran karang taruna sebagai kemajuan desa sangat dibutuhkan.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dilakukan dengan maksud guna memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait penelitian-penelitian serupa yang pernah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu tentang bagaimana partisipasi karang taruna dalam monitoring pengalokasian dana desa selain itu juga untuk mengetahui bagian-bagian yang belum pernah diteliti oleh peneliti BAB sebelumnya agar bagian tersebut dapat diteliti oleh peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tengku Rika, Roni Ekha Putera, Cici Safitri yang melakukan penelitian berfokus pada bagaimana pemanfaatan dana desa pada masa pandemi covid-19 di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model pemanfaatan dana desa di Nagari Talang Anai. Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan alokasi dana desa digunakan untuk Pertama, untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 Nagari Talang Anau melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan Covid-19. Kedua, Dana desa digunakan untuk padat karya tunai desa, Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Talang Anau di masa pandemic ini adalah membentuk posko Covid-19 di Nagari Talang Anau yang terdiri dari masyarakat, pemuda-pemuda dan niniak

mamak.¹⁵

Kedua, penelitian bertujuan untuk menguji peran partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam mencapai good governance menuju pembangunan pedesaan. penelitian ini dilakukan di kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan menghasilkan kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) Peran Partisipasi Masyarakat Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari Pembangunan Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, (b) Peran Akuntabilitas Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yang melibatkan masyarakat untuk mencapai tujuan yaitu Pembangunan Desa telah berjalan dengan baik, (c) Publikasi dalam bentuk spanduk atau pengumuman pada saat musyawarah tentang rincian penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa masih ada yang belum terlaksana dengan baik, (d) Secara keseluruhan, Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pembangunan Desa Pada Desa yang ada di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik.¹⁶

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan aspirasi masyarakat, gender, dan kelompok marginal dalam pengalokasian dana desa di desa karangdiyeng, kecamatan kutorejo kabupaten Mojokerto sekaligus besarnya pengaruh. hasil dari penelitian ini adalah Aspirasi Masyarakat, Gender, dan Kelompok Marginal berpengaruh parsial terhadap Pengalokasian Dana Desa di “Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto” dengan Nilai signifikansi (Sig) < 0,05. Aspirasi Masyarakat, Gender dan Kelompok Marginal berpengaruh simultan terhadap Pengalokasian “Dana Desa di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto”. Besar nilai koefisien determinasi (R Square) adalah 0,379 atau sama dengan 37,9%. Nilai tersebut mengandung variabel (X1), (X2) dan (X3) secara simultan (bersamaan) berpengaruh terhadap variabel (Y) sebesar 37,9% (kurang dari 50%). Sedangkan sisanya ($100\% - 37,9\% = 62,1\%$) dipengaruhi oleh variable

¹⁵ Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2.

¹⁶ Situmorang, C. V., Simanjuntak, A., & Elisabeth, D. M. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Keuangan Dan Perbankan (JIKA)*, 9(2), 131-142.

lainnya.¹⁷

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh K. Rapiandi Isak Merang dengan judul “Peran Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pembangunan Di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemuda karang taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau, serta untuk mengetahui apasaja kendala yang dihadapi pemuda Karang Taruna Bunga Bakung dalam pembangunan di Desa Metun Sajau. Hasil dari apa yang diteliti oleh kajian ini adalah bagaimana penelitian menunjukkan peran Karang Taruna Bunga Bakung dalam Pembangunan yang dilakukan di Desa Metun Sajau, hal ini dapat dilihat dari pembangunan fisik yang diantaranya pembangunan sarana jalan, pembangunan rumah adat, dan pelestarian kesenian daerah. Penelitian ini menciptakan suatu gagasan dan temuan baru, bahwa penelitian menunjukkan bahwa peran pemuda Karang Taruna Bunga Bakung terlihat dari bagaimana keberlangsungan program pembangunan di Desa Metun Sajau. Beberapa kendala yang dialami dalam peranan pembangunan Karang Taruna Bunga Bakung yaitu keterbatasan dana, kurangnya sarana an prasarana, kurangnya komunikasi dan koordinasi pimpinan, sibuk karena pekerjaan, kurang tegasnya pimpinan karang taruna, kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya perhatian dari pemerintah desa.¹⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dhani Akbar dan Teguh Setiandika Igiyasi dengan judul “Peran dan Partisipasi Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Di Desa Pongkar Kabupaten Karimun”. Penelitian ini memiliki tendensi untuk mengetahui sejauh mana partisipasi pemuda dalam mengembangkan wisata di Desa Pongkar, dalam penelitian ini menegaskan bahwasanya peran pemuda jangan hanya sebagai partisipatoris namun juga turut andil dalam pengembangan desa tersebut dengan alasan bahwa pemuda memiliki banyak pemikiran yang lebih segar. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa partisipasi pemuda Karang Taruna Desa Pongkar Kecamatan Tebing hanya sebatas dalam pengelolaan dan perawatan wisata. Hal ini memiliki beberapa kelemahan karena minimnya peran yang diberikan kepada pemuda desa Pongkar, maka gagasan maupun ide yang seharusnya hadir dari pemuda juga tidak mampu terealisasi secara

¹⁷ nikmah, n., & setiono, h. (2020). *Pengaruh aspirasi masyarakat, gender, dan kelompok marginal dalam pengalokasian dana desa di desa karangdiyeng kecamatan kutorejo kabupaten Mojokerto* (doctoral dissertation, universitas islam majapahit).

¹⁸ K. Rapiandi Isak Merang and Robert Robert, “Peran Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pembangunan Di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 7, no. 1 (2019).

baik. Poin-poin dari penelitian ini adalah mencari bagaimana kebutuhan sinergitas yang baik antara masyarakat khususnya pemuda dan pemerintahan desa sehingga timbul kesadaran untuk memajukan perekonomian daerah melalui kebermanfaatan pengelolaan wisata. Pada bagian berikutnya juga menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintahan desa memberikan kepercayaan yang besar kepada para pemuda bahwa mereka mampu ikut serta dalam mengembangkan kemampuan desawisata.¹⁹

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Badar Kumeira dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Baru Sungai Deras” membahas mengenai bagaimana partisipasi masyarakat di Desa Baru Sungai Deras dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Baru Sungai Deras, hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa peran masyarakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan pengelolaan dan desa di Desa Baru Sungai Deras tergolong berjalan dengan baik dan cukup signifikan, karena banyak program pembangunan yang sudah terealisasi, sesuai dengan susunan rencana pembangunan desa. Hal ini dikuatkan dengan beberapa data empiris tentang beberapa karakteristik informan berdasar umur, pekerjaan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Senada dengan hasil penelitian, hasil dari observasi mengenai tema terkait dapat dijabarkan melalui beberapa aspek yang bisa dijelaskan. Aspek pertama adalah pengukuran hasil pekerjaan, yang hasilnya adalah sangat baik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kedua ditelisik dari perbandingan hasil pekerjaan dengan standar yang sudah ditentukan, dengan hasil bahwa seluruh pekerjaan sudah memenuhi standar dengan pengawasan yang sudah dilakukan dengan baik dan hasil sesuai harapan, ketiga melalui pengoreksian penyimpangan dengan melalui tindakan perbaikan, tidak ada indikasi yang memperlihatkan terdapat suatu penyimpangan dan semua rencana dikategorikan berjalan dengan baik, keempat bagaimana tendensi penelitian dilihat dari bagaimana penelitian dan pengukuran, hal ini diukur dengan indikasi seberapa berpartisipasi elemen di dalam desa dan disimpulkan bahwa semua elemen turut andil dalam pembangunan ini, yang terakhir adalah skema penetapan standar, penetapan standar sudah sangat baik dan dikategorikan sebagai pembangunan yang berhasil karena mencakup semua tujuan pembangunan dan menciptakan keberhasilan.²⁰

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Sastro M. Wantu, Lucyane Djaafar, Yayan Sahi

¹⁹ Dhani Akbar and Teguh Setiandika Igiati, “Peran Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Di Desa Pongkar Kabupaten Karimun,” *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2019): 193–211..

²⁰ Badar Kumeira, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Baru Sungai Deras,” *Journal of RESIDU* 2, no. 9 (2018): 26–39.

dengan judul “Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Dasar di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliu Kabupaten Gorontalo”. Penelitian ini memiliki tendensi untuk melihat bagaimana partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah tersebut. Dalam penelitiannya secara garis besar membahas mengenai bagaimana efektifitas partisipasi karang taruna Desa Kaliyoso demi terbentuknya karakter pemuda yang bisaberpartisipasi dalam membangun desa. Isu ini berawal dari keresahan tentang bagaimana kurang aktifnya komunikasi antara pemuda dan pemerintahan Desa Kaliyoso yang justru menjadi penghambat pembangunan desa itu sendiri. Demikian isu tersebut harapan dilakukannya kajian mengenai isu ini dapat menciptakan solusi mengenai pelebagaan kepemudaan desa yang bisa dijadikan media untuk berkumpul agar bisa melahirkan inovasi kreatif untuk membangun Desa Kaliyoso. Penelitian ini kemudian menghasilkan suatu kesimpulan yang menyampaikan bahwa berdasarkan kegiatan sosialisasi kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul isu terkait dapat dikategorikan sudah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini didasarkan dengan pembahasan awal bagaimana kurang berpartisipasi pemuda dalam pembangunan desa dikarenakan miskomunikasi antara generasi muda dalam kelembagaan kepemudaan yaitu karang taruna, kemudian dengan terciptanya sosialisasi pemuda dalam pembangunan desa yang mana acara tersebut sebelumnya telah melalui koordinasi dengan tokoh setempat, internalisasi pemahaman partisipasi pemuda terhadap pembangunan dikategorikan sangat lancar dan berhasil dengan membuahkan hasil sosialisasi yakni kesadaran pemuda dalam hal ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa khususnya dalam kelembagaan karang taruna serta terjalinnya kerja sama antar pemuda karang taruna di Desa Kaliyoso, Kabupaten Gorontalo.²¹

Kedelapan, Kajian dengan judul “Analisis Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) Terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten PakPak Bharat” yang dilakukan oleh Juwita Rahmadani Manik, membahas mengenai bagaimana peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan (PSP3) terhadap pembangunan desa di Kabupaten PakPak Bharat. PSP3 sendiri dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasi pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas masyarakat terutama kaum muda di pedesaan. Penelitian ini membuahkan hasil yang menunjukkan terdapat peran pemuda dalam peningkatan pendapatan masyarakat binaan PSP3 yaitu terjadi peningkatan pendapatan setelah adanya PSP3. Hasil dari kajian ini dibuktikan dengan rata-rata pendapatan masyarakat sebesar

²¹ Sastro M Wantu, Lucyane Djaafar, and Yayan Sahi, “Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dasar Di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliu Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Abdidas* 2, no. 2 (2021): 407–10.

Rp. 951.67 setelah mengikuti program meningkat menjadi 1435.83. peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat bervariasi mulai dari Rp. 300.000/d Rp.650.000 dan hasil uji korelasi menunjukkan terdapat peran pemuda dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pada bidang pertanian khususnya usaha tani cabai merah yaitu dengan adanya korelasi yang signifikan.²²

Kesembilan, kajian yang dilakukan oleh Vera Yuniar mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Tahun 2022 dengan judul “Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Berkelanjutan” Vera yuniar, 2022. “Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Berkelanjutan” membahas mengenai bagaimana peran karang taruna di Desa Kalatiri terhadap pembangunan berkelanjutan, faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi karang taruna serta strategi yang dilakukan karang taruna. Penelitian dengan jenis deskriptif kualitatif menunjukkan hasil keterlibatan karang taruna dalam membantu masyarakat dalam pembentukan indeks manusia dengan mengajarkan pendidikan agama sejak dini serta bekerja sama dengan pemuda Desa Mabonta dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara penanaman mangrove. Strategi yang dilakukan karang taruna dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan menjaga silaturahmi pemuda desa, memimpin pemuda desa untuk tetap berpartisipasi dan aktif dalam menyalurkan pikiran dan kemampuan yang mereka miliki serta peduli terhadap lingkungan Desa Kalatiri untuk kemajuan desa itu sendiri, dimana salah satu asset terbesar dalam pembangunan adalah sumber daya manusianya.²³ Hubungannya dengan penelitian ini adalah tentang komitmen pemuda dalam pembangunan daerah, hal itu bisa dikatakan karena dalam konteks partisipasi pemuda dalam monitoring dana desa, pemuda Desa Bendungan memiliki komitmen untuk membangun desa dengan memastikan akuntabilitas dana desa dalam pembangunan yang didanai oleh dana desa.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Rachma Aprilia dan Elvia Rosantina Shauki Mahasiswa Universitas Indonesia, dengan Judul “Peran Masyarakat dalam Pengawasan Dana Desa” yang dilakukan di Desa Jeungjing Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, meneliti mengenai bagaimana proses peran masyarakat Desa Jeungjing dalam mengawasi proses realisasi dana desa di desa tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi peran masyarakat dalam pengawasan Dana Desa di Desa Jeungjing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat Desa Jeungjing terhadap Dana Desa masih belum optimal disebabkan

²² Juwita Rahmadani Manik, “Analisis Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (PSP3) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat,” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 02 (2016): 290–308.

²³ Vera Yuniar (2022), ‘Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Berkelanjutan’, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo.

oleh karena tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat yang masih rendah serta akses informasi yang belum memadai. Sebagai konsekuensinya, diskusi yang terjadi antara dua pihak (aktor akuntabel dan forum akuntabel) serta konsekuensi yang muncul menjadi minimum adanya.²⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Rachma Aprilia dan Elvia Rosantina Shauki memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dalam hal pengawasan dana desa, bedanya penelitian ini lebih fokus pada bagaimana peran karang taruna sebagai generasi muda dalam mengawasi dan memonitoring dana desa di Desa Bendungan. Namun, tujuan dari penelitian ini sama yaitu peran masyarakat dalam mengawasi proses politik penganggaran dana desa.

Kesebelas, Penelitian yang dilakukan oleh Nansi Riandita dan Erma Sarfah, Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu dengan Judul “Tata Kelola Dana Desa Karang Taruna Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah”. Penelitian ini memiliki tujuan bagaimana tata kelola dana desa menjadi salah satu isu penting dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Karang Truna, sebagai organisasi yang beranggotakan unsur pemuda yang aktif di berbagai desa, sering kali mendapatkan peran strategis dalam proses pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan di Desa Nakau di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, memberikan gambaran jelas mengenai praktik pengelolaan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan transparansi dalam penggunaan dana. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggali bagaimana Karang Taruna Desa Nakau terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan yang lebih inklusif, di mana kebutuhan masyarakat diidentifikasi secara jelas dan terwakili dengan baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa. Karang Taruna Desa Nakau secara rutin mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat untuk menyampaikan laporan penggunaan dana desa secara detail, termasuk alokasi anggaran dan proyek yang sedang atau telah dilaksanakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas tetapi juga menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh karang taruna. Keterkaitannya dengan penelitian ini adalah kesamaan tujuan pada aspek pengelolaan dana desa dan tujuan transparansi penggunaan dana desa, bedanya adalah lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, serta beberapa aspek penelitian yaitu jika dalam penelitian yang dilakukan di Desa Nakau lebih menekankan pada bagaimana Karang Taruna Desa Nakau membuat laporan

²⁴ Aprilia, R. & Shauki, E.R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(1), 61-75.

penggunaan anggaran dana desa yang akan dilaporkan di masyarakat umum sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Sedangkan itu, dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek bagaimana Karang Taruna Desa Bendungan memastikan transparansi dan akuntabilitas penganggaran dana desa di Desa Bendungan yang telah atau akan dilakukan oleh pemerintah Desa Bendungan serta memastikan segala aspirasi masyarakat yang sekiranya relevan dengan kebutuhan desa yang akan dijadikan program pembangunan terlaksana tanpa adanya penyalahgunaan dana.²⁵

Kedua belas, Penelitian yang dilakukan oleh Umi Purwanti, seorang staf Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti dengan judul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim”. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif ini menggambarkan bagaimana pemerintah Desa Melilian dalam menerapkan prinsip transparansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui penelitian ini, dijelaskan bahwa masyarakat terlibat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana desa. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan akses informasi secara terbuka sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam tanggung jawabnya mengelola anggaran dana desa, sehingga masyarakat dapat langsung mengetahui aliran dana desa yang digunakan untuk program pembangunan desa. Hasil penelitian ini sangat sesuai jika menjadi acuan meneliti peran partisipasi Karang Taruna Desa Bendungan dalam memonitoring dana desa, terutama dalam peran bagaimana karang taruna dapat berfungsi sebagai pengawas penggunaan anggaran dana desa. Dalam hal ini karang Taruna Desa Bendungan dapat berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat, sehingga proses pengelolaan anggaran dana desa di Desa Bendungan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dengan peran karang taruna yang memastikan penganggaran dana desa itu transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa semakin naik dan membentuk lingkungan masyarakat yang harmonis.²⁶

Ketiga belas, Penelitian yang dilakukan oleh Darmawati, Musyriyah Mahmuddin, dan Syamjaya SM dari Universitas Andi Djemma Palopo dengan judul “Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Karang Taruna Desa Tombang)” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana

²⁵ Riandita, N., & Sarfah, E. (2021). Tata Kelola Dana Desa Karang Taruna Desa Nakau, Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Kewirausahaan & Bisnis*, 3(2), 127-130.

²⁶ Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79-90.

peran Karang Taruna Desa Tombang sebagai organisasi kepemudaan dalam pembangunan Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Menunjukkan bahwa Karang Taruna Desa Tombang telah berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang berdampak signifikan terhadap pembangunan desa. Partisipasi mereka tidak hanya membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi desa, tetapi juga memperkuat eksistensi Karang Taruna sebagai agen pembangunan di tingkat desa. Penelitian ini dapat dikatakan relevan sebagai tinjauan pustaka peran Karang Taruna Desa Bendungan dalam monitoring dana desa, karena aktivitas karang taruna yang terlibat dalam pembangunan menunjukkan bahwa organisasi ini dapat memainkan peran penting dalam memastikan transparansi penggunaan dana desa. Keterlibatan mereka dapat memperkuat pengawasan terhadap implementasi program pembangunan yang didanai oleh dana desa.²⁷

F. Landasan Teori

1. Teori Partisipasi Andrea Cornwall

Andrea Cornwall dalam artikel "*Unpacking Participation : Models, Meanings, and Participations*" menjelaskan tentang konsep partisipasi dan bagaimana proses penerapannya yang tergantung pada konteks dan tujuan tertentu. Cornwall dalam konsep partisipasi lebih menyoroti pada bagaimana proses pengembangan masyarakat atau proyek sering kali dipahami secara berbeda oleh setiap pihak yang terlibat.

Pemahaman yang berbeda oleh setiap pihak dalam proses partisipasi dalam hal ini merujuk pada bagaimana partisipan itu tergolong dalam partisipan aktif yang benar-benar inklusif hingga partisipan yang hanya bersifat simbolis atau manipulatif dalam proses partisipasi.²⁸

Cornwall dalam membahas mengenai konsep partisipasi dalam pendekatannya juga mendiskusikan dengan beberapa tokoh, dalam diskusi tersebut menciptakan beberapa tipologi yang terkenal dalam pembangunan komunitas, berikut tipologi yang paling sesuai dengan penelitian ini yaitu *Typology of Participation* yang dikemukakan oleh Pretty, sebagai berikut:

a. *Manipulative Participation* (Partisipasi manipulatif)

Partisipasi manipulatif dalam konsep partisipasi yang ditemukan oleh Cornwall dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan yang paling rendah dalam konteks pengambilan keputusan. Hal itu terjadi karena masyarakat hanya

²⁷ Darmawati, D., Mahfuddin, M., & Syamjaya, S. S. (2022). Peran Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan Desa. *Journal I La Galigo*, 5(1), 11-20.

²⁸ Cornwall, A. (2008). *Unpacking "Participation": Models, meanings and practices*. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>

terlibat untuk memenuhi syarat formal, dan peran kehadiran mereka hanya bersifat simbolis. Situasi ini sering kali terjadi ketika suatu pemerintah atau suatu organisasi menyelenggarakan suatu forum diskusi menghadirkan karang taruna atau unsur lain namun hanya sebatas untuk menunjukkan bahwa mereka mengikutsertakan unsur masyarakat, padahal keputusan sudah diambil sebelumnya. Oleh karena itu, partisipasi ini hanya bersifat menciptakan ilusi keterlibatan saja tanpa memberikan kekuatan pengaruh nyata kepada karang taruna. Penelitian ini dapat mengeksplorasi tentang bagaimana dan mengapa partisipasi manipulatif sering terjadi dalam konteks pengawasan dana desa di Desa Bendungan, serta bagaimana dampaknya terhadap efektivitas pengawasan tersebut.²⁹

b. *Passive Participation* (Partisipasi Pasif)

Partisipasi pasif dalam konsep partisipasi dapat dilihat ketika unsur masyarakat dalam forum musyawarah hanya berperan sebagai penerima informasi tanpa dilibatkan dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Jika disesuaikan dengan penelitian ini maka akan melihat bagaimana Karang Taruna Desa Bendungan dalam musyawarah dana desa hanya diberitahu tentang alokasi anggaran tanpa memiliki kesempatan untuk memberikan pendapat atau masukan. Partisipasi pasif jika terjadi akan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang proses penganggaran, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana secara kritis sesuai dengan konsep siklus anggaran. Dalam penelitian ini nantinya akan memperlihatkan bagaimana situasi di mana partisipasi pasif mungkin terjadi dan bagaimana hal ini akan berkontribusi terhadap tantangan yang dihadapi Karang Taruna Desa Bendungan dalam monitoring dana desa.³⁰

c. *Functional Participation* (Partisipasi Fungsional)

Partisipasi fungsional merujuk pada bagaimana keterlibatan masyarakat atau karang taruna yang dilakukan dengan tujuan tertentu, karena sering kali untuk mencapai tujuan program pembangunan tanpa memberdayakan mereka. Dalam konteks penelitian ini, Karang Taruna Desa Bendungan mungkin diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, tetapi keterlibatan mereka

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

tidak mencakup pengambilan keputusan dari pemerintah desa yang lebih luas. Dalam hal ini, karang taruna bisa dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan program pembangunan, bukan sebagai partisipan yang memiliki suara. Keterlibatan mereka mungkin saja hanya di tahap pelaksanaan, tanpa mempertimbangkan pandangan atau aspirasi mereka. Penelitian melalui pendekatan konsep ini dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh Karang Taruna Desa Bendungan tentang bagaimana bentuk partisipasi mereka dalam monitoring dana desa, serta melihat apakah peran serta mereka bisa bergeser dari fungsional ke partisipasi yang lebih memberdayakan.³¹

d. *Intercative Participation* (Partisipasi Interaktif)

Partisipasi interaktif dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan yang lebih dinamis, di mana karang taruna atau unsur masyarakat dilibatkan dalam analisis, perencanaan, dan pengambilan keputusan program pembangunan. Dalam penelitian ini nantinya akan melihat apakah mereka terlibat dalam program pembangunan yang didanai oleh dana desa untuk berkolaborasi dalam merancang program, membahas alokasi anggaran, dan memberikan masukan secara signifikan atau tidak. Bentuk partisipasi ini tidak hanya memperkuat suara karang taruna, tetapi nantinya juga akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program pembangunan yang akan direalisasikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Bendungan. Jika konsep partisipasi ini diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan keputusan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga dapat melihat, sejauh mana Karang Taruna Desa Bendungan diikutsertakan dalam proses pembangunan dan bagaimana efektivitas mereka dalam memonitoring dana desa di Desa Bendungan.³²

e. *Self-mobilization* (Mobilisasi Mandiri)

Mobilisasi mandiri dalam konsep ini merupakan bentuk partisipasi tertinggi, di mana karang taruna atau unsur masyarakat secara independen mengambil inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Hal ini berarti akan

³¹ Ibid.

³² Ibid.

melihat bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika karang taruna berhasil melakukan mobilisasi secara mandiri, hal itu akan menunjukkan adanya pemberdayaan yang efektif dan signifikan. Penelitian ini nantinya akan melihat juga bagaimana karang taruna melakukan mobilisasi mandiri dalam proses keterlibatan mereka untuk memonitoring politik penganggaran dana desa.³³

Dalam tujuannya mengatasi problematika partisipasi dalam siklus anggaran dana desa, penting untuk memahami konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Cornwell dalam memahami bagaimana penerapannya di lapangan. Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Cornwall nantinya akan memberikan suatu konsep berfikir yang dapat digunakan untuk menganalisis situasi partisipasi Karang Taruna Desa Bendungan dalam tujuannya memonitoring anggaran dana desa sesuai dengan konsep siklus anggaran. Dengan memahami dan mengeksplorasi berbagai konsep partisipasi, nantinya penelitian ini bisa memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas partisipasi Karang Taruna Desa Bendungan dalam memonitoring dana desa. Karena, dengan meningkatkan efektivitas mereka, nantinya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta memperkuat peran Karang Taruna Desa Bendungan sebagai agen perubahan dalam pembangunan desa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hal-hal yang alami atau obyek natural . Tujuan metode kualitatif untuk mengetahui pola yang terjalin dalam hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan keadaan yang ada di masyarakat menjadi lebih kompleks serta memperoleh pemahaman mengenai makna terkait peristiwa yang sedang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilaksanakan guna memahami lebih mendalam secara menyeluruh serta berorientasi pada pemecahan masalah dan analisis data.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Bendungan, dengan sample observasi penelitian 7 Karang Taruna Dusun sebagai sub Karang Taruna Desa meliputi Karang Taruna Dusun Pepen, Karang Taruna Dusun Kuncen, Karang Taruna Dusun

³³ Ibid.

Sanggrahan Lor, Karang Taruna Dusun Sanggrahan Kidul, Karang Taruna Dusun Klopoh Sepuluh, Karang Taruna Dusun Bendungan Lor, dan Karang Taruna Dusun Bendungan Kidul. dan 1 Karang Taruna Desa Bendungan Sebagai Pusat dari seluruh Karang Taruna di Desa Bendungan. Karang Taruna yang dijadikan sebagai objek observasi adalah Karang Taruna di Desa Bendungan yang ikut berpartisipasi dalam musyawarah pengalokasian dana desa. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan keresahan peneliti terkait sejauh mana dan bagaimana posisi Karang Taruna Desa Bendungan dalam keterlibatan mereka di setiap dinamika penganggaran dana desa di desanya dan riwayat peneliti sebagai Ketua Karang Taruna di Dusun yang ada di Desa Bendungan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

a. Data Primer

1) Observasi

Observasi dilaksanakan agar peneliti dapat membuka wawasan, terbuka dan tidak terpengaruh oleh hal-hal lain. observasi dilakukan peneliti guna mengidentifikasi bagaimana peran partisipasi karang taruna di Desa Bendungan dalam pengalokasian dana desa. Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara terjun ke lapangan atau lokasi penelitian yang telah ditentukan. Adapun peneliti dalam melakukan observasi dengan cara terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan 3 karang taruna yang ada di Desa Bendungan dan 4 pejabat Pemerintah Desa Bendungan dan 1 Badan Independen yaitu Badan Permusyawaratan Desa Bendungan guna mengetahui bagaimana peran partisipasi karang taruna dalam pengalokasian dana desa oleh pemerintahan desa dan mewawancarai pemerintahan Desa Bendungan guna mengetahui bagaimana arah alokasi dana desa di Desa Bendungan dari perspektif pemerintahan desa.³⁴

2) Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan tujuan mengetahui tanggapan dari pihak yang diwawancarai,

³⁴ Mappasere, S. A., & Suyu

ti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

pendapat dan motivasi seseorang mengenai suatu objek. Objek wawancara dalam penelitian ini adalah Perangkat desa Desa Bendungan dan Karang Taruna di Desa Bendungan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini membutuhkan 8 informan, terdiri dari 4 perangkat desa 3 Karang Taruna di wilayah Desa Bendungan dan 1 Badan Permusyawaratan Desa Bendungan.³⁵

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu catatan suatu peristiwa yang terjadi masa lampau dapat berupa tulisan, gambar, maupun video. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mendokumentasikan hasil penelitian sebagai acuan guna peneliti mendeskripsikan profil wilayah, kegiatan organisasi Karang Taruna di Desa Bendungan dan bagaimana proses musyawarah dusun dan musyawarah kalurahan di Desa Bendungan.

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dan mendokumentasikan kegiatan musyawarah pengalokasian dana desa, rekaman wawancara bersama narasumber dan gambar APBD Desa Bendungan selama 3 Tahun Terakhir. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data dan informasi yang dapat menunjang keabsahan hasil penelitian. Sumber dari studi pustaka mengenai data penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai tema serupa juga dijadikan sebagai penunjang dan penguat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk menjadi pelengkap dan penunjang data primer, data ini dapat menambah referensi penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, disertasi, atau literatur dalam bentuk lain yang bersifat referensi sesuai dengan tema penelitian yang dibahas untuk menunjang hasil penelitian.

H. Metode Analisis data

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lokasi penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,

³⁵ Ibid.

memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola terkait. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keeluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi.³⁶ Dalam penelitian kualitatif reduksi data lebih singkatnya diartikan sebagai pengurangan data, reduksi dilakukan dengan memilih data yang dianggap penting dan relevan dengan penelitian yang kemudian disesuaikan dengan teori yang akan peneliti gunakan.³⁷

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan sebuah proses penyajian dari sekumpulan informasi yang telah didapat peneliti yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan atas objek yang sedang diteliti. Selain itu penyajian data memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya atas informasi yang diperoleh dari data yang telah dimiliki.²⁹

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan sebuah hasil yang diperoleh dari data terkumpul yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap kemudian menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian tentang “Transparansi Pengelolaan Dana Desa : Studi Kasus Peran Partisipasi Karang Taruna Desa Dalam Monitoring Dana Desa Desa Bendungan Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo.” Dengan studi bagaimana peran keaktifan karang taruna dalam monitoring dana desa dan pembangunan, dibagi menjadi beberapa bab dalam pembahasannya, adapun sistematika pembahasan penelitian ini berisi tentang penjelasan tema terkait yang akan diteliti yaitu peran karang taruna dalam transparansi dana desa di Desa Bendungan.

Dalam bab ini memiliki sub judul yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan dalam penelitian. Dalam bab pertama menjelaskan bagaimana permasalahan yang ada di dalam masyarakat sesuai tema yang akan diteliti, selain itu bab pendahuluan menjelaskan mengenai ketertarikan peneliti terhadap tema fenomena sosial yang diteliti, bagaimana keadaan

³⁶ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr Patta Rapanna, SE., (CV. Syakir Media Press).

³⁷ Prof. Dr. Sugiyono., 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Alfabeta) : 169

sosial berjalan sehingga memunculkan masalah sehingga menjadikan tema penelitian ini menjadi sangat menarik untuk dikaji, dibahas, dan diteliti.

Bab pertama, merupakan bab yang berisi penjelasan tema yang akan diteliti. Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang memiliki sub judul yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan dalam penelitian. Dalam bab pertama menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat sesuai tema yang akan diteliti, selain itu bab pendahuluan juga menjelaskan ketertarikan peneliti dengan tema dan mengapa menjadikan tema tersebut penting untuk diteliti.

Bab kedua, merupakan bab yang menjelaskan tentang obyek yang akan dijadikan penelitian secara umum, yaitu kondisi desa bendungan, mulai dari keadaan geografis, potensi desa, dan struktural desa. Kemudian ada gambaran umum tentang karang taruna di desa Bendungan meliputi struktural organisasi dan bagaimana organisasi sub karang taruna yang ada di masing-masing padukuhan di desa Bendungan

Bab ketiga, dalam bab ini dijelaskan mengenai bagaimana keterlibatan karang taruna dalam monitoring dana desa, mulai dari keterlibatan ditingkat paling bawah sampai mengawal program agar terealisasi, didalamnya juga terdapat kendala apa saja yang dihadapi karang taruna dalam monitoring dana desa dan apa solusi yang diambil dalam menghadapi kendala tersebut.

Bab Keempat, dalam bab ini berisi tentang pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dalam penelitian melalui analisis data dengan menggunakan teori yang telah ditentukan pada bab pertama yaitu Teori Partisipasi Andrea Cornwall

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus penutup dalam sebuah penulisan. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil dari penelitian yang telah dianalisis berdasarkan teori.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengaji terkait problematika partisipasi dalam siklus penganggaran dana desa, dengan studi kasus peran partisipasi Karang Taruna dalam monitoring dana desa di Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo. Hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan yang mencerminkan peran penting Karang Taruna dalam proses pembangunan dan pengelolaan dana desa yang dihadapkan dengan problematika masyarakat di Desa Bendungan dalam musyawarah perumusan program pembangunan desa yang didanai oleh dana desa. Penelitian ini lebih jauhnya mengaji peran dan tantangan partisipasi Karang Taruna dalam pengawasan pengalokasian dana desa di Desa Bendungan.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana memahami peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dalam menyikapi dana desa dan bagaimana bentuk gerakan sosial yang dilakukan Karang Taruna, pengaruhnya terhadap prioritas alokasi dana desa, serta proses yang menjadikan Karang Taruna sebagai mitra efektif pemerintah desa dalam program-program yang didanai oleh dana desa. Berdasarkan tujuan dan hasil analisis yang dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan yang diperoleh,

1. Bentuk Gerakan Sosial Karang Taruna Desa Bendungan dalam Pengalokasian Dana Desa sesuai dengan Undang-undang tentang Desa

Undang-undang yang digunakan dalam merujuk penelitian ini adalah UU No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dilakukan berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.³⁸ Artinya, jika kita korelasikan dengan penelitian ini maka akan disimpulkan bahwa setiap proses pembangunan yang dilakukan oleh desa termasuk program yang didanai dengan dana desa, dilaksanakan secara terbuka kepada masyarakat supaya terjaga akuntabilitas dan transparansinya, dalam penelitian ini keterlibatan Karang Taruna Desa Bendungan dalam monitoring dana desa menunjukkan nilai-nilai yang sesuai dengan pancasila dan undang-

³⁸ Badan Pemeriksa Keuangan RI, UU No. 6 Tahun 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

undang dasar dengan cara menjaga berjalannya birokrasi pemerintah desa agar dilakukan secara transparan dan bersih.

2. Efektivitas Karang Taruna sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Program Dana Desa

Karang Taruna Desa Bendungan dalam konteks kemitraan memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dapat membantu pengawasan penggunaan dana desa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Karang Taruna dapat berperan sebagai mitra yang efektif dalam memastikan transparansi dana desa dengan berkomitmen pada akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa dengan turut serta dalam proses perencanaan dan evaluasi program pembangunan di Desa Bendungan. Sebagai mitra pemerintah, Karang Taruna dapat berfungsi sebagai pengawas independen yang memberikan masukan untuk perbaikan pengelolaan dana desa.

Sikap kritis dan keterlibatan Karang Taruna Desa Bendungan dalam setiap forum musyawarah terkait dana desa dalam penelitian ini menjadi indikator kuat bahwa Karang Taruna Desa Bendungan merupakan mitra yang efektif dalam pelaksanaan program yang didanai melalui dana desa. Meskipun demikian, agar peran mereka lebih optimal, diperlukan peningkatan kapasitas anggota Karang Taruna Desa Bendungan dalam memahami tentang dana desa agar nalar kritis yang mereka miliki dapat lebih berkembang dan berdampak positif.

3. Posisi Karang Taruna Desa Bendungan dalam partisipasi sesuai dengan tipologi Andrea Cornwall

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa keterlibatan Karang Taruna Desa Bendungan dalam berusaha menjadi organisasi independen untuk mengawasi dan terlibat langsung dalam setiap dinamika penganggaran dana desa masuk dalam setiap tipologi yang telah disampaikan oleh Andrea Cornwall diantaranya :

- a. Partisipasi Manipulatif
- b. Partisipasi Pasif
- c. Partisipasi Interaktif
- d. Partisipasi Fungsional
- e. Mobilisasi Mandiri

Dari kelima konsep itu, setiap konsep proses partisipasi karang taruna masuk didalamnya, meskipun karang taruna dapat dikategorikan sebagai partisipasi aktif dan interaktif dengan keterlibatannya dan sikap mereka, namun juga dapat disebut sebagai partisipasi pasif dan fungsional, meskipun kedua konsep itu hampir sama pemaknaannya

namun memiliki perbedaan, bahwa partisipasi pasif lebih cenderung karang taruna desa bendungan hanya menerima hasil saja seperti beberapa forum musyawarah yang karang taruna hanya menerima hasil dengan aspirasi mereka yang kalah dengan argumentasi aspirasi kelompok lain, jika partisipasi fungsional diindikasikan bahwa memang karang taruna terlibat langsung tetapi mereka tidak bisa memobilisasi diri mereka secara mandiri dalam konteks program pembangunan desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa rekomendasi saran yang dapat diberikan peneliti untuk meningkatkan efektivitas partisipasi Karang Taruna dalam pengawasan dana desa,

1. Penguatan Kapasitas Karang Taruna dalam Monitoring Dana Desa

Penguatan kapasitas Karang Taruna dalam monitoring dana desa dalam hal ini adalah dengan mengadakan pelatihan yang mendalam terkait proses pengelolaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar seluruh anggota Karang Taruna dapat lebih memahami tentang bagaimana proses pendanaan pembangunan yang dibiayai oleh dana desa, sehingga ketika ada problematika yang kemudian hari dihadapi, mereka semua akan kritis dan paham terhadap masalah tersebut.

2. Meningkatkan Transparansi Dana Desa Sesuai Undang-Undang Desa

Upaya transparansi memang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Bendungan sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, namun sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan, masyarakat kurang dapat menerima bukti yang telah disampaikan oleh pemerintah tentang penggunaan dana desa melalui baliho atau website, solusi yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan forum transparansi terbuka di suatu ruang publik Desa Bendungan yang dihadiri oleh perwakilan atau seluruh masyarakat Desa Bendungan

3. Mendorong Sinergi yang Lebih Kuat antara Pemerintah Desa dengan Karang Taruna

Sinergi yang erat antara Karang Taruna dan pemerintah Desa Bendungan akan memungkinkan tercapainya program desa yang lebih transparan dan akuntabel. Sehingga peran keterlibatan Karang Taruna di setiap forum musyawarah dana desa tidak hanya menjadi kehadiran yang sifatnya formalitas, tetapi kehadiran atau partisipasi mereka benar-benar memiliki fungsi strategis sesuai dengan siklus anggaran yaitu turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

4. Pengembangan Budaya Kritis di Kalangan Pemuda Desa

Seperti yang telah disampaikan di awal bahwa dalam forum musyawarah dana desa seringkali terdapat tantangan yaitu adanya representasi kepentingan dalam setiap individu atau kelompok masyarakat. Adanya representasi kepentingan itu menjadi sebuah hal penting untuk menculnya daya kritis dari Karang Taruna Desa Bendungan yang terlibat dalam musyawarah dana desa. Pengembangan budaya kritis di kalangan pemuda merupakan hal positif yang harus bersama-sama diperjuangkan baik itu oleh pemerintah desa maupun organisasi Karang Taruna, karena dengan sikap kritis yang berkembang maka proses pembangunan desa yang dibiayai oleh dana desa akan berjalan dengan inklusif, transparan, dan akuntabel. Adanya partisipasi tidak menjamin representasi kepentingan, agar kepentingan itu terwadahi harus ada sikap kritis dalam diri karang taruna di Desa Bendungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Vera Yuniar (2022), “Peran Karang Taruna dalam Pembangunan Berkelanjutan”, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Akbar, Dhani, and Teguh Setiandika Igi. “Peran Pemuda Dalam Pengembangan Wisata Di Desa Pongkar Kabupaten Karimun.” *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2019): 193–211. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v3i2.856>.
- Antasah, Putri Aleeah. “Menganalisis Program Kalimasada Kota Surabaya Dari Perspektif Prinsip Dasar Birokrasi Weberian.” *Jurnal Pengabdian Nasional* 02, no. 06 (2022): 88–97.
- Armadi, Irsan. “Analisis Peran Pemuda Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1 (2020): 144–51. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.41>.
- Julianto, I Putu, and Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi. “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (2019): 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>.
- Kementrian Keuangan. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.” *Kemenkeu RI*, 2020.
- Kumeira, Badar. “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa Di Desa Baru Sungai Deras.” *Journal of RESIDU* 2, no. 9 (2018): 26–39. www.rc-institut.id.
- Manik, Juwita Rahmadani. “Analisis Peran Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Di Pedesaan (PSP3) Terhadap Pembangunan Desa Di Kabupaten Pakpak Bharat.” *Jurnal Ekonomi* 21, no. 02 (2016): 290–308.
- Merang, K. Rapiandi Isak, and Robert Robert. “Peran Pemuda Karang Taruna Bunga Bakung Dalam Pembangunan Di Desa Metun Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)* 7, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.31629/juan.v7i1.1138>.
- Moderat, Jurnal. “1783-6428-1-Pb” 4, no. November (2018): 69–80.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. “Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- Aprilia, R. & Shauki, E.R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 61-75. 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara,” no. 2 (2014): 1–25.
- Permana, Septian Aji. “Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015.” *Proceeding Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta* 1–11 (2015): 318–22. <https://core.ac.uk/download/pdf/53060575.pdf>.
- Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Bersumber Dari APBN.” *Pemerintah RI*, no. 2 (2016): 1–12.
- Runa, I Wayan. “Pengertian Desa (Nyata, Fiktif) Yang Mempengaruhi Pola Pikir Masyarakat Dalam Pengungkapan Sistem Desa Tenganan.” *Awal Mula Pembentukan Desa*, 2013, 1–24.
- Suhaira, Anggun, Nilda Elfemi, and Yenita Yatim. “Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Desa Seleman Kecamatan Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.” *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health* 1, no. 1 (2023): 41–46. <https://doi.org/10.57235/jetish.v1i1.36>.
- Wantu, Sastro M, Lucyane Djaafar, and Yayan Sahi. “Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dasar Di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo.” *Jurnal Abdidas* 2, no. 2 (2021): 407–10. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v2i2.266>.
- Sutrisna, I. W. (2022). Meningkatkan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa Melalui Optimalisasi Peran Karang Taruna. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 5(2), 16-24.
- Kusen, S. K., Pioh, N. R., & Monintja, D. K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Pinonobatan Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Yuhertiana, I., Pranoto, S., & Priono, H. (2015). Perilaku disfungsional pada siklus penganggaran pemerintah: Tahap perencanaan anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(1), 25-38.
- Putra, A. D., Norhuda, N., & Chandra, R. (2020). Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 1(1), 1-13.
- Cornwall, A. (2008). *Unpacking "Participation": Models, meanings and practices. Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>

Web :

Badan Pemeriksa Keuangan RI, UU No. 6 Tahun 2014,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Anggaran pendapatan dan belanja desa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bendungan Tahun 2021”, (2021).

Website kalurahan bendungan, “Pengukuhan Karang Taruna Kalurahan Bendungan Periode 2021-2026”. November (2021).

Kementerian Keuangan, “*Strategi Penyerapan Anggaran Kementerian/Lembaga di Akhir Tahun 2022*”, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/strategi-penyerapan-anggaran-kementerianlembaga-di-akhir-tahun-2022>. diakses pada 8 Oktober 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

[Sejarah Desa - Kalurahan Bendungan \(bendungan-kulonprogo.desa.id\)](http://sejarah.desa-kulonprogo.desa.id)

[Potensi Unggulan - Kalurahan Bendungan \(bendungan-kulonprogo.desa.id\)](http://potensi.desa-kulonprogo.desa.id)

Website Desa Keru Lombok Barat. 2020-2024. Badan Permusyawaratan Desa.

<https://keru.desa.id/lembaga/detail/badan-permusyawaratan-desa-5201032004>

Buku :

Prof. Dr. Sugiyono., 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Alfabeta) : 169

M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr Patta Rapanna, SE., (CV. Syakir Media Press).

Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. *Metode Penelitian Sosial*, 33.

Joni Rusmanto, Gerakan Sosial : Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahannya, (Jl. Taman Pondok Jati J 3, Taman Sidoarjo : Penerbit Zifatama Publishing, 2013), hlm. 77.